

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Bontolempangan Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Bontolempangan Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2021-2026. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021-2026).

LKj Kantor Kecamatan Bontolempangan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Bontolempangan. Penyusunan LKj Kantor Kecamatan Bontolempangan Tahun 2023 bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kecamatan Bontolempangan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor Kecamatan Bontolempangan Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Indikator kinerja utama yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Kecamatan Bontolempangan Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

AL ASHAR, S.STP., M.M.
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP : 197903141998101001

A. LATAR BEKALANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Kantor Kecamatan Bontolempangan berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Bontolempangan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BAB I



P E N D A H U L U A N

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa Disebutkan bahwa Kecamatan Bontolempangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut di atas dirinci sebagai berikut :

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

1. memvalidasi perumusan kebijakan strategis kecamatan berdasarkan dokumen perencanaan daerah yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. mendistribusikan dan membagi tugas kepada Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing agar pelaksanaan tugas menjadi lancar;
4. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas menjadi lancar;
5. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan;
6. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta kenyamanan lingkungan masyarakat;
7. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan standar operasional prosedur agar meningkatkan ketertiban umum;
8. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar meningkatkan pelayanan lebih berkualitas;
9. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan sekretaris kecamatan dan kepala seksi di tingkat kecamatan berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan;
10. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan berdasarkan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional desa dan/atau kelurahan;
11. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

kecamatan berdasarkan peraturan Bupati sebagai peningkatan pelayanan ke masyarakat;

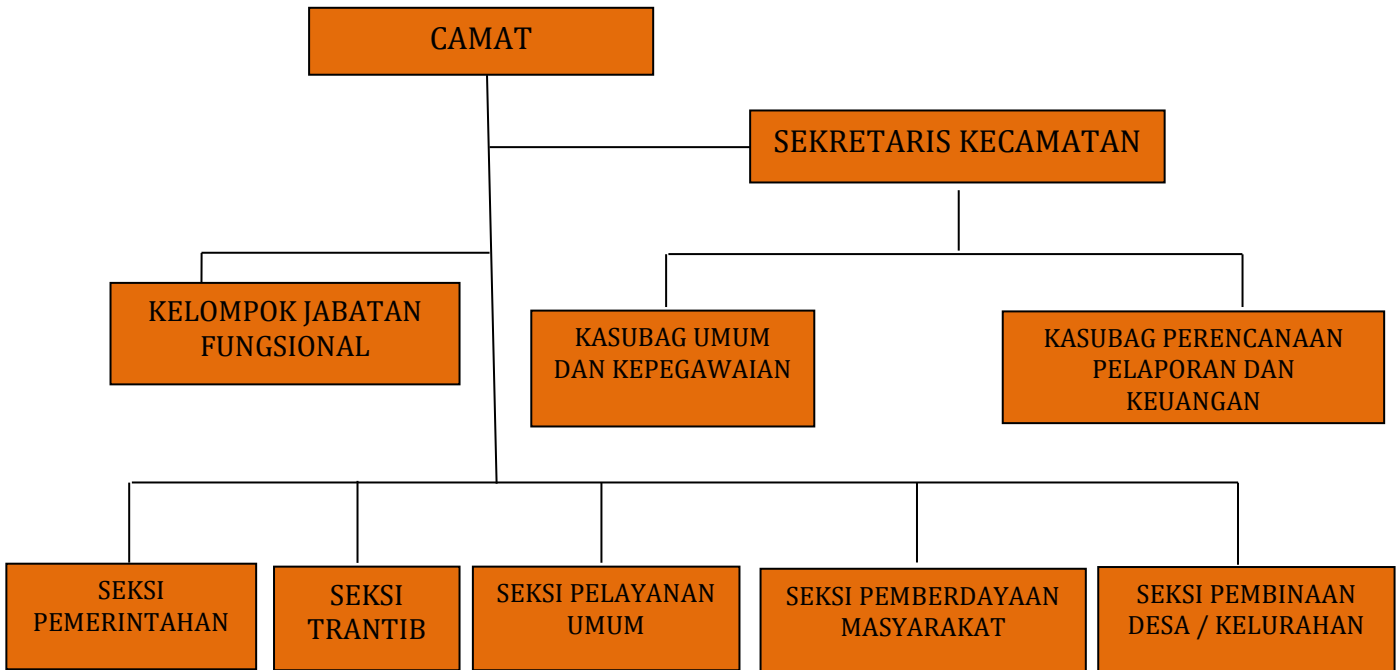
12. mengelola perizinan yang menjadi kewenangan Camat berdasarkan peraturan dan keputusan Bupati agar pelayanan lebih berkualitas;
13. membina kedisiplinan dan menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan kecamatan berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara;
14. memvalidasi bahan - bahan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan sebagai bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten agar tercipta pemerataan pembangunan;
15. memvalidasi bahan - bahan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan kecamatan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja kecamatan;
16. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan meliputi pelayanan administrasi umum, kehumasan, keprotokoleran, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja kecamatan;
17. mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar penetapan target kinerja dapat dicapai;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Struktur Organisasi

Kantor Kecamatan Bontolempangan terdiri atas Camat Bontolempangan sebagai pimpinan SKPD, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Pembinaan Desa/ Kelurahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta staf. Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bontolempangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa
(Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016)



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa memiliki pegawai sebanyak 11 orang. Dari jumlah tersebut 6 orang di antaranya pegawai kecamatan dan 5 orang Sekertaris Desa. Jumlah pejabat eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, pejabat Eselon IV sebanyak 3 orang terdiri dari pejabat Eselon IVa sebanyak 3 orang (4 kepala seksi di kecamatan) dan fungsional umum (pelaksana) sebanyak 1 orang dan 5 orang fungsional umum Sekertaris Desa.

Berdasarkan eselon jabatan, Kantor Kecamatan Bontolempangan terdiri atas 2 orang yang menduduki jabatan eselon III, 3 orang menduduki jabatan eselon IV dan fungsional umum sebanyak 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

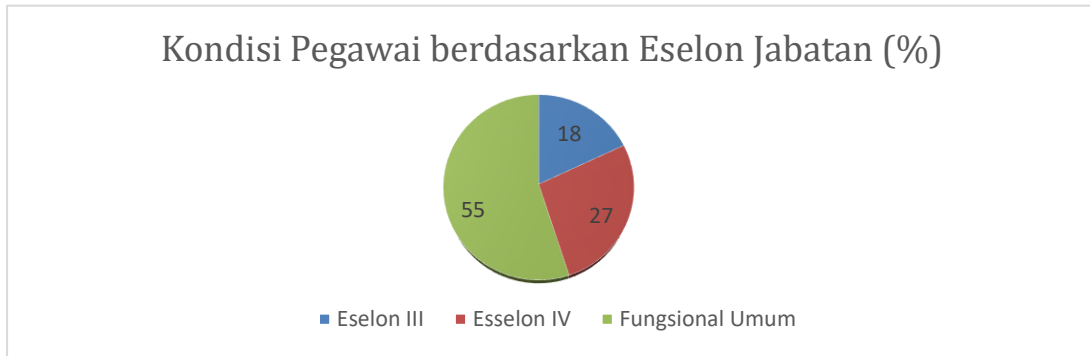
Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum	Jumlah
1.	Kecamatan Bontolempangan	-	-	2	3	6	11
Persentase (%)		0	0	18	27	55	100

Gambar 1.2

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan



Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang

Kondisi kepegawaian berdasarkan golongan ruang pada Kantor Kecamatan Bontolempangan terdiri atas: golongan III sebanyak 8 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang dan golongan II sebanyak 4 orang, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Uraian	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
1.	Kecamatan Bontolempangan	2	4	5	-	11
Persentase (%)		18	36	46	-	100

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir, Kantor Kecamatan Bontolempangan terdiri atas 3 orang pada Strata II (S2), 3 orang pada Strata I (S1), seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Strata II	Strata I	Diploma II/III	SMA/SMK Sederajat	Jumlah
1.	Kecamatan Bontolempangan	3	3	-	5	11
Jumlah		3	3	-	5	11
Persentase (%)		27	27	-	46	100

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi kepegawaian berdasarkan jenis kelamin pada Kantor Kecamatan Bontolempangan terdiri atas 11 orang laki-laki dan 2 orang pegawai perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kecamatan Bontolempangan	9	2	11
Jumlah		9	2	11
Persentase (%)		82	18	100

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Bontolempangan tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Kecamatan Bontolempangan di antaranya adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bontolempangan;
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang di Kantor Kecamatan;
3. Kurangnya Jumlah SDM yang ada di Kantor Kecamatan Bontolempangan.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan / Dinas selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Bontolempangan Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Kecamatan Bontolempangan berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Kantor Kecamatan Bontolempangan dalam meningkatkan kinerja di bidang Pelayanan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada Aspek internal, Kecamatan Bontolempangan melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti penambah ruang ramah anak pada kantor kecamatan Bontolempangan, ruang menyusui bagi Ibu serta penambahan ruangan musholla . Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan Pelayanan Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Kecamatan Bontolempangan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bontolempangan Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Kecamatan Bontolempangan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Bontolempangan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke - 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

- Misi ke 4** : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas
- Tujuan** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien
- Sasaran** : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Bontolempangan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Fungsi Penunjang menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026.

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontolempangan di antaranya adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik.

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip	BB	BB	AA	AA	AA
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	85	87	88	89	90

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 mengalami perubahan, yaitu pengurangan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Persentase peningkatan kelurahan kategori cepat berkembang. Hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan reviu terhadap sasaran strategis kecamatan dan penyesuaian terhadap Pohon Kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, IKU Pemberdayaan Masyarakat di Desa bukan merupakan kinerja inti kecamatan, karena program yang mendukung IKU tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing 8 Desa yang ada di Kecamatan Bontolempangan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Kecamatan Bontolempangan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

sedangkan arah kebijakan Kecamatan Bontolempangan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan standar operasional produk dan standard pelayanan publik
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan dan Keuangan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Kecamatan Bontolempangan adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Bontolempangan pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Bontolempangan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Camat Bontolempangan Nomor: 7/SK-IKU/BTL Tahun 2023 Tentang SK Perubahan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan bontolempangan Kabupaten Gowa. Adapun indikator kinerja utama Kecamatan Bontolempangan yaitu :

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip	BB	BB	AA	AA	AA
2	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	85	87	88	89	90

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 mengalami perubahan, yaitu pengurangan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan indikator Persentase peningkatan kelurahan kategori cepat berkembang. Hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan reviu terhadap sasaran strategis kecamatan dan penyesuaian terhadap Pohon Kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, IKU Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bukan merupakan kinerja inti kecamatan, karena program yang mendukung IKU tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing 8 Desa yang ada di Kecamatan Bontolempangan.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci 13 indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2023 Kecamatan Bontolempangan

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.277.731.379

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.440.000

Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan Daerah total anggaran sebesar Rp. 1.277.731.379 Sedangkan sasaran strategis 2 didukung program yang sama yaitu program penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan total anggaran 30.440.000 . Berikut rincian anggaran untuk masing-masing sasaran pada Kantor Kecamatan Bontolempangan

Tabel 2.4
Rincian anggaran sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran
----	-------------------	----------

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Rp. 1.277.731.379
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Rp. 30.440.000

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 mengalami perubahan, yaitu pengurangan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan indikator Persentase peningkatan kelurahan kategori cepat berkembang. Hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan reviu terhadap sasaran strategis kecamatan dan penyesuaian terhadap Pohon Kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, IKU Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bukan merupakan kinerja inti kecamatan, karena program yang mendukung IKU tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing 8 Desa yang ada di Kecamatan Bontolempangan.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja pada Kantor Kecamatan Bontolempangan ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan pos pelayanan publik

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB	-	-	belum ada nilai LHE 2023

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	87	86,49	99,41%	realisasi hampir mencapai target
--	-----------	----	-------	--------	----------------------------------

Adapun realisasi kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 86,49 % pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 85,2 %.

Untuk indikator nilai SAKIP, realisasi belum ada mengingat inspektorat daerah Kabupaten Gowa belum melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja Kecamatan Bontolempangan Tahun 2023.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB	BB	-				BB	-			
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	84	85,2	86,49				100,2	99,41			

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 - 2026 untuk menunjukkan peningkatan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Indikator kinerja 1 : Nilai Sakip, untuk tahun lalu target kinerja SAKIP telah tercapai Dengan hasil BB, untuk tahun 2022 Kecamatan Bontolempangan mendapatkan Nilai BB untuk Sakip dan untuk tahun 2023 belum ada mengingat Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa belum melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja Kecamatan Bontolempangan.

- b) Sasaran strategis : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik

Indikator kinerja 2 : Nilai IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bontolempangan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara manual setiap semester menunjukkan tingkat Kepuasan masyarakat yang bernilai baik, yang artinya hampir mencapai target yang di perjanjikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2022-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	A	BB	-				
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	89	85,2	86,49				

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Kecamatan Bontolempangan dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/ Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	-	-	-
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,49 %	-	-

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (rata2 capaian indikator sekitar 100%) sesuai yang diperjanjikan dan indicator kinerja dapat dicapai dengan maksimal Indikator : Nilai SAKIP 2022 (**Berhasil**) telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu BB dan Nilai SAKIP 2023 belum ada mengingat inspektorat daerah Kabupaten Gowa belum melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja Kecamatan Bontolempangan.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pos pelayanan publik

Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (**Berhasil**) telah tercapai Nilai 86,49% hampir sesuai target yaitu 87 dan capaian 99,41% Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik di Kecamatan Bontolempangan yakni tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai dan petugas pelayanan melayani masyarakat dengan ramah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Bontolempangan dalam mencapai Kecamatan Bontolempangan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Bontolempangan dalam pelaksanaan program kegiatan

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Targe t	Realisas i	Capai an (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	-	-	1.277.731.379	1.062.935.641	83,18 %
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	86,49	99,41	30.440.000	30.440.000	100 %

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Nilai Sakip dengan capaian kinerja belum diketahui karena LHE 2023 Kecamatan Bontolempangan belum keluar dan capaian anggaran 83,18%.
- 2) Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 86,49 % dan capaian anggaran 83,18%, adanya inefisiensi anggaran sebesar 16,82%. Inefisiensi anggaran ini disebabkan karena tidak adanya Kepastian jumlah biaya dari pelaksanaan kegiatan Jasa Pelayanan umum di Kantor Kecamatan Bontolempangan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB	-	-	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	86,49	99,41 %	Perbaiki Pelayanan dan Survey berkala Per semester

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Indikator 1 :

Nilai SAKIP, dengan target BB realisasi dan capaian belum bisa diketahui karena nilai LHE 2023 belum ada.

Sasaran 2 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik

Indikator 1 :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 87 hampir **berhasil** tercapai sebesar 86,49 atau tercapai

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

99,41%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bontolempangan pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Meningkatkan Kualitas pelaporan kinerja agar Nilai Sakip dapat mencapai target yang telah ditetapkan

Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai dan melakukan survey IKM per semester untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait Kepuasan masyarakat pada semua layanan yang ada dikantor kecamatan

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 83,18% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Kecamatan Bontolempangan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.277.731.379	1.062.935.641	83,18
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.189.013.379	919.608.637	77,34
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.858.000	40.858.000	100
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.440.000	30.440.000	100
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.420.000	17.182.011	98,63
	TOTAL	1.277.731.379	1.062.935.641	83,18

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Dari hasil analisis capaian organisasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kantor kecamatan Bontolempangan dapat disimpulkan :

- Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM telah mencapai target, dengan nilai IKM 86,49 dari target 87 sehingga capaiannya sebesar 99,41%
- Sasaran strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan indikator Nilai SAKIP, untuk tahun 2023 belum ada nilai hasil LHE SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Gowa. Namun besar harapan Kecamatan Bontolempangan memperoleh nilai sesuai dengan target indikator sasaran.

B. Langkah perbaikan kinerja

Langkah yang dapat dilakukan dalam hal perbaikan kinerja kantor kecamatan Bontolempangan kedepan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat akan dimaksimalkan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai dan dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat per semester agar peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Bontolempangan lebih terukur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Bontolempangan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Hasil Penyusunan LAKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Aparatur Kecamatan Bontolempangan baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Bontolempangan 2021-2026 menuju pada tercapainya Misi ke 4, Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kebijakan dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan Pemerintah dan masyarakat.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

AL ASHAR, S.STP., M.M.
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP : 197903141998101001